SKRIPSI

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA KARANG TARUNA DESA KERTEN KECAMATAN GANTIWARNO KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

Disusun Oleh:

PATRISIUS ALENDRA HENDRIQUES

17520087

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

APMD
YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA KARANG TARUNA DESA KERTEN KECAMATAN GANTIWARNO KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Derajat Kesarjanaan Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh

PATRISIUS ALENDRA HENDRIQUES

17520087

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

ii

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Maret 2022

Pukul : 12:00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

1. **Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si** : .....

   Dosen Penguji/Pembimbing

2. **Ir. Nelly Tiurmida, MPA** : .....

   Penguji Samping 1

3. **Utami Sulistiana, S. P.,M.P** : .....

   Penguji Samping 2

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

iii

PERNYATAAN KEASLIHAN

Saya yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : **PATRISIUS ALENDRA HENDRIQUES**

NIM : **17520087**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **"Upaya Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Lembaga Karang Taruna Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah"** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 7 Maret 2022

Penulis

Patrisius Alendra Hendriques

iv

MOTTO

"I can do all things through christ who strengthens me"

"Segala Perkara Dapat Kutanggung Di Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Kepadaku"

Filipi 4:13

PERSEMBAHAN

Puji syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, pernyertaan, belaskasih dan anugerahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan ini. Dan sudah sepantasnya karya yang belum sempurna ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang saya cintai dan yang saya banggakan Bapak Martinus Durung dan Ibu Fransiska Yasinta Niman. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya selama ini, sehingga saya boleh berada di titik yang berbahagia ini. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan.
2. Kedua adik saya yang sangat saya cintai dan banggakan Frederikus Armando Jerubu dan juga Hendriko Julio Balzana Jerubu. Terimaksih atas dukungan dan suportnya selama ini.
3. Keluarga besar saya, yang tidak bisa saya sebutkan Namanya satu persatu. Terimaksih yang berlimpah untuk segala doa dan dukungan serta segala bentuk support yang diberikan kepada saya dalam proses saya menuju titik Bahagia ini. Terimaksih.
4. Bapak Drs. RY. Gatot Radtya, M.Si selaku dosen pembimbing saya yang selalu dengan sabar dan total membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
5. Untuk kalian semua yang tidak sempat saya sebutkan Namanya satu persatu. Terimaksih untuk segala bentuk dukungan yang sudah deberikan kepada saya hingga saya beraa di titik Bahagia ini. Sekali lagi terimakasih, semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan tuhan.

Atas semua dukungannya yang berlimpah, penulis mengucapkan terimakasih kepada kalian semua. Semoga Tuhan melimpahkan berkat dan rahmatnya dalam keberlangsungan perjalanan hidup saudara/saudari sekalian, Amin.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang berlimpah dipanjatkan kepada sang empunya kehidupan yang masih memperkenankan penulis untuk menghasilkan karya sebagai cara untuk memuji dan memuliakan namaNya. Naskah skripsi ini disusun sebagai pemenuhan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di STPMD "APMD" Yogyakarta. Dalam karya ini, penulis mengambil judul **"Upaya Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Lembaga Karang Taruna Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah".**

Tema ini diambil oleh penulis dengan tujuan untuk mendeskripsikan Upaya Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Lembaga Karang Taruna Desa Kerten serta untuk Mendeskripsikan hambatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pembinaan Lembaga karang taruna di desa kerten.

Dalam ketidaksempurnaan penulis dalam Menyusun karya ini, terdapat banyak tangan-tangan kasih yang membantu menyelesaikan karya ini, sehingga pada kesempatan ini ijinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD" Yogyakarta.
2. Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta.
3. Drs. RY. Gatot Radtya, M.Si selaku dosen pembimbing yang setia menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dra. Sri Utami, M.Si selaku dosen pembimbing akademik penulis yang selalu mengarahkan penulis guna mempercepat masa perkuliahan di STPMD "APMD" Yogyakarta.
5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta yang setia mendidik dan berbagi ilmu kepada penulis.
6. Seluruh Karyawan/ti STPMD "APMD" Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan maksimal dalam memperlancar penulisan skripsi ini.

7. Almamater tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu akademik.
8. Pemerintah Desa maupun masyarakat Desa Kerten sebagai lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis.
9. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya satu persatu, yang dengan caranya masing-masing mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf bila ada kesalahan selama perkuliahan di STPMD "APMD" Yogyakarta dan juga selama melakukan penelitian di Desa Kerten dalam berprilaku maupun kata-kata yang kurang menyenangkan. Semoga Tuhan selalu membalas amal baik dari saudara/saudari sekalian.

Yogyakarta, 7 Maret 2022

Penulis

Patrisius Alendra Hendriques

DAFTAR ISI

SKRIPSI .....**Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN PENGESAHAN.....**Error! Bookmark not defined.**

PERNYATAAN KEASLIHAN..... iii

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....ix

DAFTAR TABEL xi

INTISARI xii

BAB I..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Kerangka Konseptual 4

F. Ruang Lingkup Penelitian..... 30

G. Metode Penelitian 31

BAB II 37

A. Sejarah Desa Kerten..... 37

B. Kondisi Geografis 39

C. Kondisi Demografis 41

D. Keadaan Sosial dan Ekonomi 47

E. Sarana dan Prasarana 48

F. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kerten..... 50

G. Karang Taruna 56

BAB III..... 62

A. Analisis Data Upaya Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Lembaga Karang Taruna Desa Kerten 62

1. Upaya pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembinaan lembaga karang taruna desa Kerten yang meliputi upaya meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian, meningkatkan mutu dan kemampuan keterampilan, melatih pelaksanaan kerja serta meningkatkan ilmu pengetahuan. 62

2. Kendala yang dihadapi dalam proses upaya pelaksanaan pembinaan lembaga karang taruna Desa Kerten. 70

BAB IV 73

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN 77

DAFTAR TABEL

Halaman

Table 1.1 Deskripsi Informan……32
Tabel 2.1 Data Nama Kepala Desa Kerten Sesuai Masa Jabatan……..38
Tabel 2.2 Luas Wilayah Menurut Penggunanya……40
Table 2.3 Batas Wilayah Desa Kerten……...40
Tabel 2.4 Kondisi Orbitasi Desa Kerten……41
Table 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia…….42
Table 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin……..43
Table 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Agama……44
Table 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan…….45
Table 2.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian……46
Table 2.10 Sarana dan Prasarana di Desa Kerten……..49

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA KARANG TARUNA DESA KERTEN

INTISARI

Hadirnya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014, Desa menempati posisi sentral dan strategis dalam pembangunan nasional. Dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 terdapat 4 kewenangan dalam proses pembangunan desa. Keempat kewenangan tersebut yang menjadi sorotan peneliti adalah tentang pembinaan masyarakat Desa. Ada berbagai macam bentuk kelompok pembinaan, yang menjadi fokus peneliti adalah tentang pembinaan kelompok karang taruna. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya-upaya Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Pembinaan Karang Taruna dan hambatan-hambatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pembinaan karang taruna di Desa Kerten

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner dari 5 informan diantaranya pemerintah desa, pihak karang taruna dan juga masyarakat, khususnya orang-orang muda. Teknikan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemerintah desa dalam melaksanakan program pembinaan Lembaga karang taruna di Desa Kerten, adalah; (a) Pemerintah desa mengalokasikan dana sebesar delapan juta rupiah untuk pendanaan operasional karang taruna; (b) Pemerintah desa memfasilitasi kegiatan pemuda karang taruna dengan melibatkan pemuda karang taruna dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, seperti kegiatan vaksinasi, kegiatan penjagaan posko covid-19, dan kegiatan 17 agustus, serta kegiatan keagamaan. Adapun kendala terhadap upaya yang dilakukan pemerintah desa Kerten dalam melaksanakan program pembinaan Lembaga karang taruna adalah sebagai berikut; (a) dana yang dialokasikan pemerintah desa tidak mencukupi bagi kegiatan operasional; (b) Lembaga karang taruna tidak memiliki fasilitas yang memadai (c) kaderisasi pemuda desa tidak berjalan dengan baik

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pembinaan, Karang Taruna

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014, Desa menempati posisi sentral dan strategis dalam pembangunan nasional sampai hari ini. Undang-undang desa ini tidak menempatkan desa sebagai yang terbelakang melainkan menjadi yang terdepan dalam proses pembangunan nasional indonesia (Wijaya, 2018;2). Oleh karena itu sebagai bentuk pengakuan dari negara atas keberadaannya dengan mengendepankan azas rekognisi dan subsidiaritas kepada desa. Dilain sisi, undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, terdapat 4 kewenangan dalam proses pembangunan desa antara lain: Pertama penyelenggaraan pemerintahan desa, Kedua pelaksanaan pembangunan desa, ketiga pembinaan kemasyarakatan desa, dan Keempat pemberdayaaan masyarakat desa. Kewenangan yang dimiliki desa ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, atau lepas pisahkan dari yang lainnya melainkan berjalan beiringan dengan kewenangan yang lainya. Sehingga dengan demikian, kesuksesan sebuah Desa dalam melaksanakan pembangunan dari keterbelakangannya dan ketakberdayaannya tidak terlepas dari berjalan dan bekerjanya empat kewenangan tersebut.

Keempat kewenangan Desa tersebut yang menjadi sorotan penulis adalah tentang pembinaan masyarakat Desa. Pemerintah Desa berperan sangat penting dalam melakukan pembinaan kelembagaan yang ada di Desa seperti RT/RW, PKK, Karang Taruna, keamanan dan lembaga lainnya, yang mana lembaga ini nantinya menjadi salah satu indikator dalam proses pembangunan dan kemajuan di sebuah desa. Dari berbagai macam bentuk kelompok pembinaan tersebut yang menjadi fokus penulis adalah tentang pembinaan kelompok karang taruna. Menurut Yeyet (2019), Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kepemudaan di Indonesia, dimana Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang berkembang atas pemahaman serta rasa tanggung jawab sosial khususnya

generasi muda di Desa ataupun Kelurahan maupun komunitas sosial sederajat, khususnya bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Selaku organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna adalah wadah pembinaan serta pengembangan dan pemberdayaan dalam upaya meningkatkan aktivitas produktif dengan pendayagunaan seluruh kemampuan yang ada dilingkungan. Karang Taruna didirikan dengan tujuan membagikan pembinaan serta pemberdayaan kepada para anak muda, misalnya dalam bidang keorganisasian, ekonomi, berolahraga, keahlian, advokasi, keagamaan serta kesenian.

Selaku wadah generasi muda di desa Karang Taruna dibentuk oleh masyarakat desa atau kelurahan, berdiri sendiri serta independent. Aktivitas karang taruna dititik beratkan pada program pengembangan bidang kesejahteraan sosial, sehingga tugasnya mengatasi kasus sosial generasi muda di lingkungannya. Ada pula tujuan yang dicapai Karang Taruna terciptanya pemuda yang bertumbuh dalam keadaan jasmai serta rohaninya, bisa melakukan fungsi- fungsi sosial serta bertanggung jawab, mempunyai keinginan dan keahlian untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Keberhasilan dari program pembinaan pemuda dan pemudi melalui karang taruna pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh keadaan organisasi karang taruna. Dalam hal ini, eksistensi organisasi selaku lembaga pemberdayaan perlu mendapatkan dorongan terutama dari lembaga yang terikat dengan pembinaan serta pengembangan organisasi ataupun legislatif (kepala desa/ lurah) beserta perangkatnya, BPD, LKMD serta tokoh warga (Suhindarno, 2019).

Kepala Desa merupakan pimpinan desa yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penerapan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan (Suhindarno, 2019). Berkaitan dengan tugas dan wewenangnya tersebut maka hubungannya dengan studi ini, karang taruna dipandang sebagai aset desa yang sangat potensial. Kemampuan ini hendak menjadikan utilitas yang besar dalam menunjang penerapan pembangunan desa apabila dilaksanakan pembinaan, pelatihan serta atensi

dari kepala desa sebagai pembina kehidupan penduduk desa. Tetapi pada realitasnya, masih ada Karang Taruna yang belum maksimal dalam memberikan kontribusi pada masyarakat, dan cenderung tidak optimal dalam melakukan sesuatu kegiatan. Perihal itu, disebabkan kurang adanya pembinaan dan pengawasan terhadap Karang Taruna oleh Pemerintah Desa. Hal ini pula terjadi pada kelompok karang taruna di Desa Kerten yang selama ini mengalami kemunduran.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis, ditemukan kelompok Karang Taruna di Desa Kerten tidak aktif. Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Contohnya, kurangnya jumlah pemuda dan pemudi yang mendiami wilayah Desa Kerten. Hal ini dikarenakan banyak pemudan yang pergi merantau setelah menamatkan pendidikan di bangku SMK. Alasan lain juga adalah banyak pemuda dan pemudi yang sudah menikah walaupun usia masih mudah dan mereka memutuskan untuk tidak terlibat dalam karang taruna. Selain itu juga kurangnya perhatian dan dukungan dari pihak Desa terutama kepala Desa yang menjabat sebelumnya sehingga mengakibatkan kelompok pemuda tidak menganggap dan mempersoalkan pentingnya untuk menjadi bagian dari kelompok karang taruna tersebut dan kurangnya sikap kritis dari kelompok pemuda dan pemudi di Desa Kerten untuk mempertanyakan dan mempersoalkan pentingnya berorganisasi dalam mewujudkan demokrasi Desa melalui kelompok karang taruna. Terkait dengan hal itu dalam penelitian ini penulis mengamati upaya Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pembinaan masyarakat terutama pembinaan karang taruna dengan judul "Upaya Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Karang Taruna Di Desa Kerten Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan penelitian sebgai berikut:

1. Bagaimana upaya-upaya Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pembinaan karang taruna di Desa Kerten?
2. Apa yang menjadi hambatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pembinaan karang taruna di Desa Kerten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukan maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui upaya-upaya Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Pembinaan Karang Taruna Di Desa Kerten.
2. Mengetahui hambatan-hambatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pembinaan karang taruna di Desa Kerten.

D. Manfaat Penelitian

1. Dalam ranah teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan mengenai pentingnya mengaktifkan kelompok karang taruna demi terwujudanya demokrasi desa sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU No/6 2014.
2. Dalam ranah praktis, penelitian ini diharapkan dapat mempertimbangkan aspek dalam penyelenggaran praktek demokrasi desa terutama dalam hal mengaktifkan kelompok karang taruna di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Upaya

Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787) Upaya adala usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Dapat disimpulkan upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud

tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang di harapkan.

Menurut Poerwadarminta (2006:1344), “upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lainnya.

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan suatu strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya (Soeharto 2002). Upaya juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, serta terarah yang bertujuan untuk menjaga sesuatu hal (soekamto 1984;237).

Surayin (2001:665) mengungkapkan bahwa upaya merupakan usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya.

Jenis-Jenis Upaya

- Upaya preventif memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.
- Upaya preservatif yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya merupakan suatu usaha terhadap suatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

2. Pembinaan

Pembinaan secara umum diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dilain sisi pembinaan juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Pembinaan lebih menekankan pada pendekatan praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. Pembinaan Berkenan dengan hal tersebut berikut defenisi pembinaan menurut beberapa para ahli.

a. Pengertian Pembinaan

Pembinaan secara konseptual berasal dari kata *'power'* (kekuasaan atau pemberdayaan). Sebab itu, ide pokok dalam pembinaan merujuk pada konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali disangkut pautkan dan berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan apa yang diinginkan, diluar dari keinginan dan minat mereka. Pembinaan menunjuk pada kekuatan dan kemampuan individu atau kelompok dalam masyarakat, khususnya kalangan bawah yang lemah dan rentan sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar sehingga ada kebebasan *(freedom)* yang dimiliki, dalam artian bukan hanya bebas menyampaikan pendapat melainkan bebas dari ketertindasan, bebas dari rasa lapar dan bebas dari kesakitan.

2. Menjangkau segala sesuatu untuk produktifitas yang menjadikan peningkatan dalam pendapatan serta barang dan jasa yang dibutuhkan dapat diperoleh.
3. Berpartisipasi dan ikut serta dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang dapat mempengarungi tarar kehidupan mereka.

Pembinaan secara bahasa berasal dari kata “bina”. Pembinaan adalah suatu proses, pembuatan, cara melakukan pembinaan, perubahan kearah lebih baik, adanya usaha dan tindakan yang dilakukan yang memiliki daya guna melalui kegiatan agar menghasilkan daya guna yang baik. (KBBI, 2001).

Menurut Musanef (2000) mengemukakan bahwa pembinaan adalah segala sesuatu yang dilakukan melalui usaha yang berhubungan langsung mulai dari tahap perencanaan, penyusunan program, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta melakukan pengendalian dari segala sesuatu yang berdaya guna dan pencapaian hasil guna yang baik.

Menurut Thoha (2001) pembinaan merupakan suatu proses, untuk mencapai hasil atau pertanyaan untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Pencapaian dalam hal ini dapat mewujudkan adanya suatu perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi dari berbagai kemungkinan yang terjadi.

Pembinaan menurut Ahmad Tanzeh (2009) dapat diartikan sebagai bantuan dari individu atau kelompok yang ditujukan kepada individu atau kelompok lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan

Menurut Poerwadarmina (1987:182), pembinaan merupakan suatu hal yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur dan terencana guna meningkatkan pengetahuan, perilaku serta keahlian subjek dengan tindakan pengarahan dan pengawasan untuk

menggapai tujuan. Hal yang sama diungkapakan oleh Hardjanan (1989: 12), pembinana merupakan sesuatu proses pembelajaran dengan melepaskan hal- hal yang telah dimilikinya, yang bertujuan buat membantu serta mengembangakan kecakapan dan pengetahuan yang telah ada dan memperoleh kecakapan pengetahuan untuk menggapai tujuan hidup, serta kerja yang telah dijalani secara efisien serta efektif.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat kita lihat bahwa pembinaan terjadi melalui proses melepaskan hal-hal yang menghambat, dan mempelajari pengetahuan dengan kecakapan yang baru yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kerja yang lebih baik. Pembinan tersebut menyangkut kegiatan perencanan, pengorganisasian, pembiayan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal seperti yang di ungkapkan oleh Widjaja (1988).

Pembinanan merupakan proses ataupun pengembangan yang mencakup urutan- urutan penafsiran, dimulai dengan mendirikan, memerlukan, dan memelihara perkembangan tersebut yang diikuti usaha- usaha perbaikan, penyempurnaan serta mengembangkannya. Guna menghindari kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi, hingga di perlukan pembinaan yang bermuatan suatu tugas, yaitu meningkatkan suatu disiplin serta motivasi sebagai suatu kebutuhan yang kesimpulannya memelihara atas apa yang didapatkan dengan melaksanakan berbagai perbaikan ke hal yang jauh lebih baik. Merujuk pada pendefinisian diatas, apabila diinterprestasikan lebih jauh, pembinaan didasarkan atas suatu konsesus yang baku serta mempunyai sifat berlaku buat seluruh. Pembinaan ialah sesuatu perangkat sistem yang wajib dijalankan secara fungsional buat menjamin bertahannya sistem tersebut sampai menggapai tujuan yang di harapkan.

Dari beberapa definisi pembinaan di atas, jelas bagi kita maksud dari pembinaan itu sendiri dan pembinaan tersebut bemuara pada adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.

b. Tujuan Pembinaan

Tujuan pembinaan secara operasional harus diketahui yang menjadi fokusnya. Fokusnya dapat diketahui melalui berbagai indikator seperti keberdayaan yang dapat menunjukkan individu berdaya guna atau tidak. Sehingga dalam melakukan program pembinaan akan bisa lebih terarah dan mengenai sasaran yang dilakukan pembinaan (misalnya; masyarakat kurang mampu) yang perlu dioptimalkan. Dalam melakukan pembinaan Schuler, Hasmaeni dan Riley (Suharto, 2004) membagi delapan indikator pengembangan, yang biasa disebut sebagai *empowerment index* atau indeks pembinaan. Keberhasilan dalam melakukan pembinaan masyarakat dapat dinilai dan dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemapanan hidupnya, kemampuan dalam mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural politis. Dari ketiga aspek diatas berkaitan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan di dalam *(power with in),* kekuasaan atas *(power over),* kekuasaan untuk *(power to)* dan kekuasaan dengan *(power within).*

Menurut Sumodiningrat (Sulistyaningsih, 2004), Proses pembinaan dilakukan tidaklah terus menerus, melainkan untuk dapat menjadi mandiri, walaupun ada kontrol dari kejauhan agar tidak jatuh lagi. Sehubungan dari pendapat tersebut bahwa pembinaan menitik beratkan pada suatu proses untuk terus belajar agar bisa berdiri sendiri atau mandiri. Namun agar kemandirian dapat terjaga

harus ada pemeliharaan yang terus menerus dari segi kemampuan, semangat dan kondisi agar tidak mengalami kemunduran lagi.

Menurut Tikson (2001), untuk mengelola sumber daya, ada model alternatif yang diterapkan sehingga kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat desa dapat meningkat yaitu model pembangunan *(community development).* Sasaran utama model ini adalah dimana bisa membantu masyarakat agar bisa meningkatkankan taraf ekonomi dan sosialnya berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerahnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam model pembangunan ini yaitu agar terciptanya masyarakat yang bisa menjadi mandiri atau masyarakat yang bisa berdiri sendiri dengan kemampuan yang dimiliki serta dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk meningkatkan perekonomiannya.

Sepemahaman dengan yang disampaikan diatas, Gany (2001) menyatakan bahwa dalam konsep pembinaan dibutuhkan upaya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu tatanan agar bisa tumbuh dan berkembang menjadi mandiri. Dalam artian dalm proses pembinaan yaitu adanya usaha-usaha yang dilakukan untuk membangun diri sendiri dari setiap orang dalam suatu tatanan agar bisa menjadikan kondisi yang lebih baik.

Hasil dari pemikiran tersebut di atas, maka terdapat tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam pengembangan aktivitas pembinaan yaitu:

1. Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan yang muncul).
2. Untuk mengembangkan diri dan pengembangan produksi harus mendapatkan jalan untuk ke sumber daya materi dan sumber daya non materi.

3. Fungsi dari organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat sebagai wadah untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan potensi masyarakat melalui kegiatan secara kolektif dan kolegial.

Oleh karena itu, pembinaan adalah suatu cara yang dilakukan dengan memberikan semangat, dorongan dan motivasi bagi sumber daya yang ada dan adanya penguatan secara individu dan kelompok dalam organisasi agar potensi dalam diri dapat bangkit atas dasar kesadarannya. Salah satu tujuan dari melakukan pembinaan masyarakat adalah agar fenomena kemiskinan semakin berkurang dalam masyarakat.

c. Fungsi Pembinaan

Dalam sebuah organisasi agar bisa mendapatkan hasil kerja yang baik, maka perlu adanya anggota atau pegawai yang sadar akan tanggung jawab yang di amanahkan, loyal, patuh pada aturan, penuh dedikasi, disiplin, jujur, setia dan taat dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku. Adapun fungsi pembinaan menurut Thoha (2001) yaitu diarahkan untuk:

1. Menumbuhkan rasa kesetiaan dan ketaatan.
2. Adanya amanah yang di jalankan sebagai bentuk tanggung jawab dan pengabdian diri dalam menjalankan tugas yang harus ditingkatkan.
3. Meningkatkan semangat akan produktivitas kerja secara maksimal.
4. Mewujudkan suatu pelayanan prima dalam organisasi dan pegawai tanpa korup serta berwibawa.
5. Melakukan pengembangan dan peningkatan kemampuan pegawai dengan cara proses pendidikan dan pelatihan berdasarkan dengan kebutuhan organisasi.

3. Karang Taruna

a. Pengertian Karang Taruna.

Karang taruna adalah organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia. Karang merupakan adalah wadah pengembangan generasi muda non partisipan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di Wilaya Desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajat yang bergerak di bidang sosial (Karang Taruna Putra Harapan ;2016) sedangkan menurut Meuraksa dan Saputra (2020), Karang Taruna adalah perkumpulan Sosial Kepemudaan yang menjadi kekuatan masyarakat sebagai kelompok yang berfungsi langsung dalam pembangunan baik di desa maupun kelurahan, tidak hanya itu, Karang Taruna harus sanggup membiasakan diri dengan perkembangan zaman yakni mengembangkan kemampuan keterampilan supaya bisa membangun kesejahteraan di lingkungan masyarakat.

Karang taruna berdasarkan pasal 1 angka 14 peraturan mentri dalam Negri No 5/2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyaraktan (Permendagri5/2007), adalah lembaga kemasyrakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang ats dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarkat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh departemen sosial.

Berdasarkan definisi diatas, dapat dilihat bahwa karang taruna merupakan suatu organisasi pemuda yang ada di desa/kelurahan sebagai wadah pengembangan potensi diri dalam bidang usaha kesejahteraan sosial. Menurut Peraturan Mentri Sosial (Permensos) RI nomor 77/HUK/2010 tentang pedoman dasar karang taruna pasal 1 ayat 1 menyatakan karang taruna adalah organisasi sosial kemasyarkatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat

tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan soaial. Sebagai organisasi kepemudaan, karang taruna berpedoman pada pedoman dasar dan pedoman rumah tangga yang mana telah diatur struktur pengurus dan massa jabatan masing-masing wilayah dari desa/kelurahan sampai dengan pada tingkat nasional. Semua ini wujud dari pada regenarasi organisasi demi kelanjutan organisasi dan pembinaan anggota karang taruna baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

b. Keanggotaan Karang Taruna

Keanggotaan karang taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan desa/ kelurahan maupun komunitas adat sederajat yang berumur 11 tahun sampai dengan 45 tahun, disebut sebagai masyarakat Karang Taruna. Setiap generasi muda dalam kedudukanya sebagai masyarakat Karang Taruna memiliki hak serta kewajiban yang sama tanpa membedakan asal generasi, kalangan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan social, pendirian politik dan agama. Dari penafsiran tersebut bisa di jelaskan kalau keanggotaan karang taruna merupakan seluruh generasi muda di lingkungan desa/ kelurahan tanpa membeda- bedakan ras, agama, jenis kalamin dan sebagaiannya.

c. Tugas Dan Wewenang Pengurus

1. Ketua

a) Kewenangan

Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan organisasi yang bersifat strategis (politis) melalui kesepakatan dalam forum Rapat Pengurus Pleno (RPP)

b) Tanggung jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan organisasi dan program kerjanya dan mempertanggungjawabkan secara internal kepada Rapat Pengurus Pleno (RPP) dan Temu Karya pada masa baktinya.

c) Tugas

1. Memimpin rapat-rapat pengurus pleno dan rapat pengurus harian.
2. Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapat kesepakatan RPP.
3. Mewakili organisasi untuk nmenghadiri upacara kenegaran tertentu atau agenda strategis lainnya.
4. Bersama-sama sekretaris menandatangi surat-surat yang berhunungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat kedalam maupun keluar.
5. Bersama-sama sekretasis dan bendahara merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktivitas operasional dan program organisasi.
6. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi.
7. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Karang Taruna dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupan demi pencapaian dan tujuan organisasi.
8. Mengoptimalkan fungsi dan peran wakil ketua agar tercapainya efesiensi dan efektifitas kerja organisasi.

2. Wakil Ketua

a) Kewenangan

Membuat danmengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan organisasi diseluruh bidang dalam pengurusan.

b) Tanggung jawab

Mengkoordinasikan dan mngorganisasikan seluruh penyelenggara progran kerja diseluruh bidang dalam pengurusan dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.

c) Tugas

1. Mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi di seluruh bidang dalam pengurusan.
2. Mewakili ketua apabila berhalangan untuk setiap aktivitas dalam roda organisasi.
3. Merumuskan segala kebijakan di seluruh bidang dalam pengurusan.
4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan di seluruh bidang dalam pengurusan.

3. Sekretaris

a) Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan roda organisasi.

b) Tanggung jawab

Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan mempertanggung jawabkan kepada ketua.

c) Tugas

1. Bersama ketua menandatangani surat masuk dan keluar pengurus.
2. Bersama ketua dan bendahara merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus.
3. Bertanggung jawab untuk setiap aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja organisasi.
4. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.
5. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat-rapat pleno dan rapat pengurus harian.
6. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasiantara bidang.
7. Menjaga dan memlilihara soliditas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan managemen konflik yang reprensetif.

4. Wakil Sekretaris

a) Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama sekretaris dalam hal kesekretariatan dan kerumahtanggan.

b) Tanggung jawab

Mengkoordinasikan seluruh aktivitas kesekretyariatan dan tata usaha organisasi dan mempertanggung jawabkan kepada sekretaris.

c) Tugas

1. Mewakili sekretaris apabila berhalangan terutama untuk setiap aktivitas kesekretariatan dan tata kerja organisasi.
2. Bersama sekretaris mengawasi seluruh penyelenggaran aktivitas organisasi di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat pleno dan rapat pengurus harian.
3. Membuat risalah dalam setiap pertemuan/rapat-rapat organisasi baik Rapat Pengurus Pleno (RPP) maupun Rapat Pengurus Harian (RPH).
4. Merumuskan, mengusulkan dan mendokumentasikan peraturan dan data yang berkaitan dengan atribut dan aset yang tidak bergerak untuk mendukung kepentigan organisasi baik internal maupun eksternal.
5. Mengusulkan dan mamfasilitasi dalam pengadaan akomodasi logistik dan travel organisasi.

5. Bendahara

a) Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam hal keuangan dan kekayaan organisasi.

b) Tanggung jawab

Mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan dan kekayaan organisasi dan mempertanggung jawabkan kepada ketua.

c) Tugas

1. Mewakili ketua apabila berhalangan hadir terutama untuk aktivitas di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi.

2. Bersama ketua dan sekretaris merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator di tubuh pengurus.
3. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.
4. Memimpin rapat-rapat organisasi di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi, menghadiri rapat pleno dan rapat pengurus harian.
5. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi.

6. Wakil Bendahara

a) Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan organisasi bersama-sama bendahara dalam pengelolaan dalam pengawasan dan pemeriksaan kekayaan keuangan.

b) Tanggung jawab

Mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan/pembukuan keuangan organisasi dan mempertanggung jawabkan kepada bendahara.

c) Tugas

1. Mewakili bendahara apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi.
2. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem pembukuan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.
3. Menyelenggarakan aktivitas pembukuan terhadap transaksi pengeluaran dan pemasukan keuangan secara rutin.

7. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan

a) Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktivitas organisasi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan Pendidikan dan Pelatihan mulai dari perencanaan hingga laporan.

b) Tanggung jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan serta mempertanggung jawabkan kepada wakil ketua.

c) Tugas

1. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.
2. Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran program kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh RPP.
3. Mendata dan menginventarisir aktivitas pendidikan dan pelatihan yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut.
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam pemberdayaan pemuda dan masyarakat pada umumnnya.
5. Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas pandidikan dan pelatihan bagi warga Karang Taruna maupun masyarakat pada umumnya.
6. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan-pelatihan.

8. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

a) Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktivitas usaha kesejahteraan sosial yang terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi Karang Taruna dalam pelaksanaan bantuan pelayanan dan rehabilitasi sosial khusunya kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mulai dari perencanaan hingga laporan.

b) Tanggung jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaran aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bidang Usaha Kesejahteraan Sosial serta mempertanggung jawabkan kepada wakil ketua.

c) Tugas

1. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja bidang Usaha Kesejahteraan Sosial sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.
2. Merumuskan dan mengusulkan program berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh RPP.
3. Mendata dan menginventarisir aktivitas bantuan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut.
4. Menyelenggarakan aktivitas bantuan sosial dalam berbagai bentuk seperti santunan dan bantuan lainnya dalam momentum tertentu secara berkala.

5. Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas Pelayanan Sosial Terpadu kepada PMKS.

9. Bidang Kelompok Dan Usaha Bersama

a) Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktivitas Pengembangan Ekonomi yang terkait dengan Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi Karang Taruna mulai dari perencanaan hingga laporan.

b) Tanggung jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaran aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi Karang Taruna serta mempertanggung jawabkan kepada wakil ketua.

c) Tugas

1. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja bidang Kelompok Usaha Bersama sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.
2. Merumuskan dan mengusulkan program berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh RPP.
3. Mendata dan menginventarisir aktivitas Kelompok Usaha Bersama yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut.
4. Membuat kelompok Usaha Bersama dan Koperasi untuk dikembangkan sebagai Wirausaha dan Kemandirian warga Karang Taruna.

5. Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas Kelompok Usaha Bersama dan koperasi.

10. Bidang Kerohanian Dan Pembinaan Mental

a) Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktivitas Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terkait dengan Kerohanian dan Pembinaan Mental mulai dari perencanaan hingga laporan.

b) Tanggung jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaran aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Bidang Kerohaian dan Pembinaan Mental serta mempertanggung jawabkan kepada wakil ketua.

c) Tugas

1. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Bidang Kerohaian dan Pembinaan Mental sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.
2. Merumuskan dan mengusulkan program berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh RPP.
3. Mendata dan menginventarisir aktivitas Bidang Kerohaian dan Pembinaan Mental yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka melalui aktivitas Bidang Kerohaian dan Pembinaan Mental baik secara temporer maupun rutin melalui lembaga-lembaga keagamaan,

perkumpulan keagamaan remaja yang bersifat koordinatif.

5. Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas Bidang Kerohaian dan Pembinaan Mental.
6. Menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan.

11. Bidang Olahraga Dan Seni Budaya

a) Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktivitas Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terkait dengan Olahraga dan Seni Budaya mulai dari perencanaan hingga laporan.

b) Tanggung jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaran aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Olahraga dan Seni Budaya serta mempertanggung jawabkan kepada wakil ketua.

c) Tugas

1. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Bidang Olahraga dan Seni Budaya sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.
2. Merumuskan dan mengusulkan program berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh RPP.
3. Mendata dan menginventarisir aktivitas Bidang Olahraga dan Seni Budaya yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut.

4. Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka melalui aktivitas Bidang Olahraga dan Seni Budaya baik secara temporer maupun rutin melalui klub-klub dan sanggar seni budaya.
5. Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas Olahraga dan Seni Budaya.
6. Menyelenggarakan Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni secara berkala.

12. Bidang Lingkungan

a) Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktivitas produktif yang terkait dengan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mulai dari perencanaan hingga laporan.

b) Tanggung jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaran aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup serta mempertanggung jawabkan kepada wakil ketua.

c) Tugas

1. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.
2. Merumuskan dan mengusulkan program berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh RPP.
3. Mendata dan menginventarisir aktivitas Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup yang sudah ada

untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut.

4. Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka melalui aktivitas Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup baik secara temporer maupun rutin.
5. Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
6. Menyelenggarakan kegiatan gerakan masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup, kerja bakti, padat karya dan sebagainya.

13. Bidang Hubungan Masyarakat Dan Kerjasama Kemitraan

a) Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktivitas produktif yang terkait dengan pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan mulai dari perencanaan hingga laporan.

b) Tanggung jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaran aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bidang hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan serta mempertanggung jawabkan kepada wakil ketua.

c) Tugas

1. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Bidang hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.

2. Merumuskan dan mengusulkan program berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh RPP.
3. Mendata dan menginventarisir aktivitas hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut.
4. Menyelenggarakan aktivitas publikatif dalam rangka memperkenalkan organisasi dengan berbagai program dan perspektif hingga mampu membentuk opini publik yang menguntungkan organisasi.
5. Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan.
6. Bertindak selaku juru bicara organisasi yang berwenang menjembatani kepentingan organisasi dengan pihak pers dan masyarakat.
7. Menyelenggarakan kegiatan masyarakat dalam bidang komunikasi.

d. Kegiatan Karang Taruna

Adanya karang taruna dimaksudkan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam rangka mewujudkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuannya tidak lain adalah terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda (Meuraksa dan Saputra, 2020). Untuk mencapai sasaran tersebut, maka ada beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan Karang Taruna itu sendiri. Menurut Agus Riyadi (2003:16), kegiatan Karang Taruna dikelompokan menjadi beberapa bidang, antara lain:

1. Bidang Lingkungan
   a) Merencanakan kegiatan gotong royong bersih-bersih desa.
   b) Melakukan kegiatan peduli lingkungan dengan menanam pepohonan di sekitar jalanan.
   c) Mengajari penduduk desa untuk tidak membuang sampah sembarangan dengan menyediakan tempat sampah di setiap sudut desa
2. Bidang Pendidikan
   a) Menolong orang-orang yang kurang mampu untuk tetap melanjutkan sekolahnya.
   b) Memberikan fasilitas seperti tas sekolah, sepatu, buku-buku agar para pelajar lebih semangat dalam mencari ilmu.
   c) Memberikan hadiah pada anak yang berprestasi Mengajarkan beberapa mata pelajaran atau memberikan pengetahuan pada anak-anak yang putus sekolah.
   d) Memastikan penduduk desa, bahkan anggota karang taruna untuk wajib bersekolah minimal 12 tahun
3. Bidang Ekonomi
   a) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan memberikannya usaha yang sesuai dengan keahliannya.
   b) Menciptakan lapangan kerja
   c) Memperluas lapangan kerja
   d) Membantu orang-orang yang kurang mampu dengan meberikannya kebutuhan pokok sehari-hari
   e) Membentuk kelompok pertanian yang nantinya bekerjasama untuk menciptakan hasil tani yang lebih baik
4. Bidang Spiritual
   a) Menyambut tahun baru Islam dengan mengadakan kegiatan yang islami
   b) Memeriahkan malam takbir hari raya idul fitri

c) Mengadakan pengajian untuk segala usia
d) Menyambut bulan ramadhan dengan membuka buka bersama di masjid terdekat oleh seluruh kampung

5. Bidang Pelatihan
   a) Melaksanakan pelatihan menjahit untuk ibu-ibu atau pemuda pemudi yang mau
   b) Menyelenggarakan pelatihan teknik komputer atau hal-hal yang berbau elektronik
   c) Melaksanakan pelatihan memasak kue
6. Bidang Olahraga
   a) Mengadakan acara jalan sehat untuk seluruh warga desa Saat 17 Agustus-an, dilaksanakan lomba olahraga
   b) Menjadwalkan untuk setiap hari-hari tertentu mengikuti kegiatan senam
   c) Membentuk kelompok sepakbola, voli atau jenis olahraga lain untuk dipertandingkan dengan desa lain
7. Bidang Kesenian
   a) Mementaskan tarian adat dari suatu daerah di panggung pertunjukkan
   b) Menampilkan pertunjukkan wayang saat hari bumi
   c) Membuat lomba yang berhubungan dengan kesenian untuk anak-anak
   d) Menjaga tradisi sebuah desa, tidak membiarkannya mati dengan selalu memegang tradisi tersebut kuat-kuat dalam setiap kesempatan

e. Tujuan Karang Taruna

1. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.

2. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda dan warga Karang Taruna yang trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan.
3. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna.
4. Termotivasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
6. Terwujudnya kesejahteraan Sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya.
7. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/ kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa Karang Taruna dibentuk dengan tujuan untuk (1) mewujudkan pertumbuhan, perkembangan kesadaran, tanggung jawab sosial, kesejahteraan dan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda; (2) membentuk jiwa dan semangat kejuangan generasi muda; dan (3) menumbuhkan potensi, kemampuan dan motivasi serta terjalinnya kerjasama antar generasi pemuda.

f. Fungsi Karang Taruna

1 Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda.

2 Menyelenggarahkan kesejahteraan sosial, jaminan sosial, meliputi; rehabilitas, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda

3 Meningkatkan usaha ekonomi produkti

4 Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

5 Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal

6 Memelihara dam memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya NKRI.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti menetapkan ruang lingkup penelitian atau batasan-batasan penelitian yang menjadi pedoman dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah:

1. Upaya pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembinaan lembaga karang taruna desa kerten yang meliputi upaya meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian, meningkatkan mutu dan kemampuan keterampilan, melatih pelaksanaan kerja serta meningkatkan ilmu pengetahuan.
2. Kendala yang dihadapi dalam proses upaya pelaksanaan pembinaan Lembaga karang taruna.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrument, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data pada umumnya bersifat kualitatif. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagi kondisi, sebagai situasi atau berbagai fenomena realita social yang ada dimasyarakat yang menjadi obyek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis bermaksud mendeskripsikan, menggambarkan dan menguraikan upaya dari pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembinaan Karang Taruna Desa Kerten. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan informasi maupun keterangan-keterangan berupa hasil pengamatan yang dialami subjek penelitian. Untuk mengetahui fenomena yang dialami subjek penelitian, penulis harus memahami segala kondisi subjek secara alamiah dan kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata. Informasi atau keterangan yang didapatkan melalui pengamatan dalam penelitian kualitatif bukan hanya didasarkan pada kondisi alamiah subyek penelit ian saja melainkan lebih menekankan makna dari setiap fenomena yang terjadi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono, yaitu: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penulis adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

2. Unit analisis

a) Objek Penelitian

Objek penelitian dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa serta segala usahanya dalam melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Karang Taruna desa Kerten.

b) Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

c) Informan

Penentuan informan atau narasumber yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling,* atau penentuan informan atau narasumber secara sengaja berdasarkan pertimbangan situasi ataupun kondisi yang sedang terjadi di lapangan (Moelong, 2002). Adapun yang menjadi informan atau narasumber dari penelitian ini adalah pemerintah desa sendiri, pihak karang taruna dan juga masyarakat, khususnya orang-orang muda.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN
1	Suyadi, S.Sos	Laki-Laki	Kepala Desa
2	Danang	Laki-laki	Ketua Karang TAruna
3	Sumekto	Laki-Laki	Wiraswasta
4	Rudi	Laki-laki	Wiraswasta
5	Gili	Laki-laki	Pedagang

Tabel 1.1 Deskripsi Informan. *Sumber: Data Primer*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a) Observasi

Metode Observasi yaitu data yang dibutuhkan atau diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena

yang relevan dengan fokus penelitian. Penekanan observasi lebih pada upaya mengungkapkan makna-makna yang terkandung dari berbagai aktivitas terarah tujuan dan hasil Observasi tersebut dimasukkan dan dicatat dalam buku catatan dan selanjutnya dilakukan pemilihan sesuai kategori yang ada dalam fokus penelitian. Observasi adalah suatu prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati dan mencatat perilaku dan pembicaraan subyek penelit ian dengan menggunakan pedoman observasi. Dalam observasi ini yang dilakukan penulis adalah mengunjungi lokasi penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengamati situassi dan kondisi yang ada di lapangan, sebelum peneliti melakukan penelitian. Observasi ini dilakukan dua kali dan berjalan dengan lancer sesuai dengan harapan.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan dan jawaban-jawaban informan dicatat dan direkam. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam, artinya proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Hal yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi narasumber utama dalam penenlitian ini. Wawancara dilakukan di lingkungan wilayah desa Kerten. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh segala data yang dibutuhkan oleh peneliti.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa catatan atau dokumen yang tersedia serta pengambilan gambar disekitar objek penelitian yang akan dideskripsikan dalam pembahasan guna membantu dalam penyusunan hasil akhir penelitian. Dalam proses dokumentasi ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan dan dibutuhkan dengan cara mencari dokumen yang tersedia serta pengambilan gambar. Hal ini dilakukan di lingungan desa Kerten.

d) Triangulasi

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar abash dengan menggunakan pendekatan atau metode ganda. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

4. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan penulis adalah deskriptif kualitatif. Analisa data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis cacatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi yang lain. Tujuan analisa data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan. Analisis data adalah suatu proses pengklasifikasian, pengkategorian, penyusunan, dan *elaborasi*, sehingga data yang telah terkumpul dapat diberikan makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data ini bertujuan mencari dan menata data secara sistematis dari hasil rekaman atau catatan wawancara, observasi dan dokumen yang telah dilakukan. Proses analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pemikiran Miles dan Huberman (1984) yang pada dasarnya meliputi 3 alur kegiatan setelah

proses pengumpulan data dan penarikan kesimpulan. Namun analisis data tidak dilakukan secara parsial dan berdiri sendiri tetapi dilakukan secara terus menerus dan terintegrasi selama dan setelah proses pengumpulan data dilakukan di lokasi penelit ian, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

   Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Penulis mengelola data dengan bertolak teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat dilapangan maupun yang terdapat pada perpustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Disini data yang telah dikumpulkan direduksi dengan melakukan penyederhanaan pengabstrakan, pemilihan dan pemetaan (persamaan dan perbedaan) sesuai dengan fokus penelitian secara sistematis. Reduksi data ini berlangsung terus menerus selama penelit ian berlangsung hingga sampai pada penarikan kesimpulan

2. Display Data

   Pada tahap ini, peneliti menyusun beberapa informasi yang diperoleh dari lapangan, kemudian disajikan dengan jelas dan tersistematis untuk mempermudah pengambilan kesimpulan. Tahap penyajian data berkontribusi pada pemahaman kondisi yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Data disajikan dalam bentuk uraian singkat dan bagan. Penyajian data bertujuan agar

peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya.

3. Kesimpulan

   Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Pada kesimpulan ini dipaparkan temuan hasil penelitian dengan memberikan penjelasan kesimpulan dari jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan.

4. Triangulasi

   Triangulasi adalah suatu metode pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menemukan lebih banyak perspektif terkait data yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model triangulasi sumber data. Maksudnya adalah peneliti menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

BAB II
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa Kerten

Desa Kerten lahir dan terbentuk pada tahun 1935, terletak di kaki Gunung Mintorogo, yang terletak di sebelah selatan wilayah Gantiwarno. Desa Kerten merupakan sebuah desa yang mempunyai penduduk rukun, makmur dan damai. Kemakmuran penduduk desa Kerten tampak pula melalui tanah yang sangat subur untuk bercocok tanam. Setelah bertahun-tahun bercocok tanam dengan hasil yang melimpah, masyarakat desa pun lupa akan adanya sang pencipta dan menjadi tamak, pada akhirnya hasil panen semakin menurun, banyak hama tanaman disana-sini. Para petani mengeluh hasil panen tidak cukup untuk konsumsi sehari-hari.

Mitos tersebut beredar di masyarakat desa dan membuat masyarakat percaya serta yakin jika ingin mendapatkan hasil panen melimpah masyarakat desa harus membuat kue apem setiap bulan Suro, tepatnya setiap hari Senin Kliwon dan harus membagikannya kepada sanak saudara. Sedangkan sebagian dari kue apem tersebut harus ada yang digantungkan di luar rumah agar tidak tertimpa musibah hingga berujung kepada kematian akibat hasil panen yang tidak baik. Berkaitan dengan hal tersebut kepala desa wilayah memberi nama Kerten yang artinya Kerta Raharjo dan sekarang bisa dibuktikan penduduk Desa Kerten banyak yang sukses, hasil pertanian melimpah sehingga penduduk Kerten sampai sekarang melestarikan tradisi tersebut dengan membuat kue apem setiap bulan Suro dan berbagi kepada sanak saudara.

Desa Kerten adalah salah satu desa yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Gantiwarno, cikal bakal orang yang tinggal di Desa Kerten adalah Ki Demang Dermo Redjo, seorang legendaris yang berjiwa besar, cerdas, trampil, berwibawa dan sakti, diangkat oleh pimpinan penjajah zaman Belanda, konon dapat membuat saluran air untuk pertanian dari bawa sungai di bawah gunung Mintorogo sampai membela Dusun Kalijuweh dan

Kali kliwon yang juga berbulu dari bukit Mintorogo hanya dengan menancapkan tongkatnya kemudian ditarik.

Pada saat itu desa Kerten dipemimpin oleh Ki Demang Dermo Redjo dilanjutkan oleh kepemimpinan yang sebut Lurah diangkat oleh Belanda, pada zaman penjajah yang bernama Kyai Singo Sentono pada masa pemerintahan Belanda-Jepang. Kerten berada dibawah kekuasaan Keraton Mangkunegaran.

Semenjak saat itu, sebelum Indonesia Merdeka Pemerintah Desa Kerten dan sampai merdeka tahun 1945 resmi dipimpin oleh seorang Lurah hingga berganti istilah menjadi Kepala Desa, yang sampai sekarang telah mengalami 9 kali pergantian Kepala Desa. Adapun yang memegang pemerintahan desa KERTEN dari masa ke masa setelah Indonesia Merdeka adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Nama Kepala Desa Kerten Sesuai Periode Kepemerintahan

No.	Nama	Tahun
1.	Demange Ndermo Rejo Kerten	1880
2.	Singo Sentono	1880 s/d 1920
3.	Wiro Sumarto	1920 s/d 1950
4.	Purwo Sumarto	1950 s/d 1975
5.	Soehartono Karteker	1975 s/d 1977
6.	Soehartono	1977 s/d 1982
7.	Soehartono	1982 s/d 1990
8.	Sihono	1990 s/d 1998
9.	Sihono	1998 s/d 2013
10.	Sarta A.Md Pd.	2013 s/d 2019
11.	Suyadi S. Sos	2019 s/d 2024

Sumber Data: RPJMDes Kerten Tahun 2019-2024

Data diatas menunjukan bahwa dari masa ke masa telah berganti kepemimpinan Lurah/Kepala Desa Kerten sebanyak 11 kali, dan dimana semuanya berjenis kelamin laki-laki. Ini dapat dilihat bahwa di Desa Kerten belum adanya Lurah/Kepala Desa yang berjenis kelamin perempuan sampai dengan periode sekarang. Dan dari tabel diatas kita dapat simpulkan bahwa masa kepemimpinan yang paling lama menjabat menjadi pemimpin desa Kerten yakni Singo Sentono pada tahun 1880 s/d 1920 yang memimpin selama 40 tahun lamanya dan masa jabatan kepala desa paling cepat yakni pada masa pemerintah Soehartono Karteker pada tahun 1975-1977 yang memimpin selama 2 tahun.

B. Kondisi Geografis

Pentingnya memahami kondisi desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul dimasyarakat.

Desa Kerten merupakan salah satu dari 16 desa di Kecamatan Gantiwarno yang terletak kurang lebih 15 Km ke arah barat dari Kecamatan Gantiwarno. Wilayah Desa Kerten memiliki luas 1.451.750 Ha. Desa Kerten terdiri dari 11 Pedukuhan, yaitu Pedukuhan Tenggil, Pedukuhan Ngesong, Pedukuhan Ngandong, Pedukuhan Kepoh, Pedukuhan Gedongan, Pedukuhan Petung, Pedukuhan Sangiran, Pedukuhan Jontro, Pedukuhan Gunung Wungkal, Pedukuhan Kalijuweh, Pedukuhan Berjo. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Kerten terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa (Sekdes), Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemrintahan, Kasi Kesejahteraan, dan 3 Kepala Dukuh. Desa Kerten terdiri dari 9 Rukun Warga (RW) dan 20 Rukun Tangga (RT).

Tabel 2.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaanya

No.	KETERANGAN	LUAS	%
1.	Luas tanah sawah	164,99 Ha	20,58
2.	Luas tanah kering	468,33 Ha	58,40
3.	Luas tanah basah	27,00 Ha	3,36
4.	Luas tanah perkebunan	0,00 Ha	0
5.	Luas fasilitas umum	68,18 Ha	8,50
6.	Luas tanah hutan	73,50 Ha	9,16
Total luas		**802,00 Ha**	**100%**

Sumber Data: RPJMDes Kerten Tahun 2019-2024

Berdasarkan tabel diatas dari total luas wilayah desa Kerten 802,00 Ha, wilayah yang paling luas adalah wilayah tanah kering dengan luas 468,33 Ha, tanah kering maksudnya adalah hamparan lahan atau tanah yang tidak pernah tergenang oleh air selama periode sebagian besar waktu dalam setahun. Tanah kering banyak digunakan untuk wilayah pemukiman warga, dan digunakan untuk lahan pertanian tembakau. Dibandingkan dengan luas tanah basah sangatlah jauh, yaitu hanya 27,00 Ha, tanah basah artinya adalah wilayah tanah yang jenuh dengan air, baik bersifat permanen atau musiman. Dan wilayah tanah basah inilah yang dijadikan lahan pertanian tetap yang mana proses bercocok tanam tanpa henti karna tidak ketergantungan dengan cuaca atau musim penghujan.

Tabel 2.3 Batas Wilayah Desa Kerten

Batas	Desa/Kel/ Kecamatan
Sebelah Timur	Desa Ngandong, Kecamatan Gantiwarno
Sebelah Selatan	Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan, DIY
Sebelah Barat	Desa Katekan, Kecamatan Gantiwarno
Sebelah Utara	Desa Sawit, Kecamatan Gantiwarno

Sumber Data: RPJMDes Kerten Tahun 2019-2024

Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa, desa Kerten berbatasan dengan 3 desa yang berada dalam Kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Gantiwarno, dan terdapat 1 desa dari Kecamatan Prambanan, yaitu Desa Gayamharjo. Sehingga dapat dikatakan desa Kerten adalah desa yang terletak dipinggr kecamatan.

Iklim desa kerten sebagaimana Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempuyai iklim kemarau dan hujan, hal tersebut menpunyai pengaruh langsung terhadap kegiataan pertanian yang ada di Desa Kerten.

Tabel 2.4 Kondisi Orbitasi desa Kerten

Jarak Dari Pusat Pemerintah Kecamatan	5 km
Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kota	15 km
Jarak Dari Ibukota Kabupaten	15 km
Jarak Dari Ibukota Provinsi	120 km

SumberData:RPJMDes Kerten Tahun 2019-2024

Melalui tabel di atas dapat diketahui letak desa Kerten jauh dengan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, dengan jarak 120 km dan membutuhkan waktu sangat lama. Namun dengan hal ini kondisi jalan di desa Kerten menuju ibu kota provinsi sudah memadai atau sudah baik. Sedangkan dari ibu kota kecamatan hanya dengan 5 km saja dan tidak membutuhkan waktu lama. Dengan kondisi jalan yang sudai memadai.

C. Kondisi Demografis

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Kerten sebesar 2.044 jiwa, diantaranya laki-laki sebanyak 1.012 jiwa dan perempuan sebanyak 1.032 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 740 KK, adapun rincian tersebut sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia

Data ini bermanfaat untuk mengetahui lajunya pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada di desa.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	00-04	62	50	112
2	05-09	80	48	128
3	10-14	75	93	168
4	15-19	78	65	143
5	20-24	57	65	122
6	25-29	72	68	140
7	30-34	47	53	100
8	35-39	81	86	167
9	40-44	78	63	141
10	45-49	77	68	145
11	50-54	42	62	104
12	55-59	48	56	104
13	60-64	47	78	125
14	65-69	54	52	106
15	70-75	114	125	239
Total		**1012**	**1032**	**2044**

Sumber data: RPJMDes Kerten Tahun 2019-2024

Melalui tabel di atas dapat dianalisis desa Kerten mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak mencapai 2.044 orang. Berdasarkan golongan umur didominasi atau yang lebih banyak pada penduduk dewasa umur 25-59 tahun mencapai 901 jiwa sedangkan untuk balita umur 0-4 tahun yang ada di desa Kerten termaksud kedalam jumlah penduduk paling sedikit hanya mencapai 112 jiwa. Jika dilihat dari usia produktif yaitu umur (25-

59) Tahun dapat membantu pembangunan desa Kerten dimana dalam usia tersebut cenderung lebih aktif dalam melakukan aktifitas serta banyak ide-ide kreatif yang dapat disumbang untuk membangun desa Kerten.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	RW	RT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	001	001	68	70	138
2	001	002	59	55	114
3	001	003	59	57	116
4	002	004	50	46	96
5	002	005	41	50	91
6	003	006	41	47	88
8	003	007	49	62	111
9	003	008	43	44	87
10	004	009	73	69	142
11	004	010	45	40	85
12	004	011	2	2	4
13	005	011	35	38	73
14	005	012	45	45	90
15	006	011	3	1	4
16	006	013	45	31	76
17	006	014	45	39	84
18	007	015	50	59	109
19	007	016	39	38	77
20	008	017	20	33	59
21	008	018	62	72	134
22	008	019	2	4	6
23	009	019	64	59	123

24	009	020	65	68	128
Total			**1012**	**1032**	**2044**

Sumber: RPJMDes Kerten Tahun 2019-2024

Berdasarkan data yang sudah ditampilkan diatas dapat disimpulkan bahwa di lingkungan Desa Kerten jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat desa Kerten mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Agama

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	879	897	1776
2	Kristen	4	3	7
3	Katholik	127	132	259
4	Hindu	1	0	1
5	Buddha	1	0	1
6	Khonghucu	0	0	0
7	Kepercayaan Lain	0	0	0
Total		**1012**	**1032**	**2044**

Sumber data: RPJMDes Kerten Tahun 2019-2024

Berdasarkan pada tabel di atas bahwa penduduk desa Kerten mayoritas beragama Islam yang mencapai 1.776 orang, dan yang beragama Hindu dan Budha masing-masing hanya 1 orang saja. Namun walaupun penduduk desa Kerten mayoritas beragama Islam, toleransi beragama di desa Kerten sangat terjaga dalam bersosial, karena dari dulu hingga sekarang belum pernah terjadi konflik antar umat beragama.

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Pendidikan

Pentingnya tingkat pendidikan tentu berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia, proses pembangunan dan pemberdayaan yang ada di desa akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Begitu pula halnya yang ada di desa Kerten, akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik dari tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman masyarakat desa. Akan tetapi jika dilihat dari data statistik rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang ada di desa Kerten dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	150	161	311
2	Belum tamat sd/sederajat	103	123	226
3	Tamat SD/Sederajat	234	264	498
4	SLTP/Sederajat	139	118	257
5	SLTA/Sederajat	326	297	623
6	Diploma I//II	6	9	15
7	Diploma III/ Sarjana	20	22	42
8	Diploma IV/Strata I	34	36	70
9	Strata II	0	2	2
10	Strata III	0	0	0
Total		**1012**	**1032**	**2044**

Sumber: RPJMDes Kerten Tahun 2019-2024

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang ada di desa Kerten rata-rata lulusan terbanyak yaitu SLTA/Sederajat yang mencapai 623 orang selanjutnya disusul oleh jumlah

tinggi kedua yaitu Tamat SD/Sederajat yang mencapai 498 orang dan tingkat pendidikan terendah yaitu Strata II yang mencapai 2 orang. Sedangkan untuk penduduk yang sampai Strata III untuk di desa Kerten belum ada. Berdasarkan data di atas dapat dikatakan sebagai desa yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah karena dilihat dari rendahnya jumlah lulusan sarjana yang ada di desa Kerten.

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mempunyai tanah yang subur membuat sebagian besar masyarakat desa Kerten bermata pencaharian disektor pertanian, hal ini dikarenakan bahwa sektor pertanian yang ada di desa Kerten mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Data menurut mata pencaharian masyarakat desa Kerten dapat dilihat dari tabel yang ada di bawah ini:

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	148	118	266
2	Ibu Rumah Tangga	0	165	165
3	Pelajar/Mahasiswa	217	210	427
4	Pensiunan	18	11	29
5	Pegawai Negeri Sipil	6	4	10
6	TNI	0	0	0
7	Polri	0	0	0
8	Perdagangan	1	6	7
9	Petani	35	31	66
10	Peternak	0	0	0
11	Konstruksi	1	0	1
12	Karyawan Swasta	89	60	149

13	Buruh Harian Lepas	326	304	630
14	Buruh Tani	98	74	172
15	Buruh Ternak	1	0	1
16	Tukang Batu	4	0	4
17	Tukang Kayu	4	0	4
18	Tukang Jahit	1	1	2
19	Tenaga Honorer	0	5	5
20	Industri	0	0	0

Sumber: RPJMDes Kerten Tahun 2019-2024

Berdasarkan pada tabel di atas terkait jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat diketahui mayoritas Buruh Harian Lepas (BHL), mencapai 630 penduduk desa berkerja BHL tersebut. Untuk penduduk Belum/tidak bekerja juga menjadi salah satu yang terbanyak di desa Kerten sebanyak 266 penduduk. Sedangkan untuk mata pencaharian yang terendah dapat dilihat bahwa desa Kerten kurang adanya tenaga kerja kesehatan, kontruksi dan buruh peternakan yakni sebanyak 1 orang saja dan disusul oleh Tukang Jahit, Pembantu Rumah Tangga dan Kepala Desa. Hal ini dapat dilihat bahwa potensi yang ada di desa Kerten merupakan sektor pertanian. Dengan banyaknya masyarakat desa Kerten yang belum atau tidak berkerja dikarenakan kurangnya lapangan perkerjaan serta daya saing SDM yang kurang memadai.

D. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Mayoritas mata pencaharian penduduk desa Kerten bergerak dibidang pertanian, dan permasalahan yang sering muncul yang berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk. Sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah kebupaten Klaten. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembagunan desa adalah melakukan penguatan modal dan fasilitas sebagai modal untuk pembangunan khususnya diekonomi produktif.

Tingkat angka kemiskinan Desa kerten yang masih tinggi menjadikan desa Kerten harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Banyaknya kegiatan ormas di desa Kerten seperti RT, LPMD, PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, Jamiyah yasin, Dharama Wanita, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok Tani, Kelompok Ternak yang merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembanguna desa pada masyarakat.

Berdasarkan data di atas desa Kerten masih dikatakan desa yang belum mampu untuk memandirikan desanya sendiri yang ada di Kabupaten Klaten, sehingga dengan adanya kekurangan yang ada di atas dapat dikatakan bahwa desa Kerten memerlukan binaan yang berdasarkan pada undang-undang terkait dengan pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang mayoritasnya adalah petani yang masih menggunakan cara manual untuk menggarap pertanian mereka tentu berpengaruh pada tingkat taraf perekonomian masyarakat desa Kerten yang kurang baik. Berdasarkan data yang didapati di lapangan masyarakat desa Kerten mempunyai sumber kekuatan dalam menjalin sebuah hubungan yang harmonis di lingkup masyarakat, dengan mengedepankan nilai leluhur yang telah tertanam sejak dahulu kala masyarakat di desa Kerten tetap mempertahankan nilai gotongroyong dan norma-norma yang berlaku guna memperkuat tali persaudaraan di desa Kerten. Kendati demikian kesehatan dan kesejahteraan masyarakatlah yang menjadi utama agar dapat berjalannya sebuah desa yang mandiri dan desa adat yang di dalamnya mengandung nilai-nilai religius dan luhur bangsa.

E. Sarana dan Prasarana

Kegiatan pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber dari kemandirian dan perkembangan yang berdampak pada perubahan sosial,

ekonomi, dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa agar menjadi lebih baik lagi.

Tabel 2.10 Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Kerten

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Posyandu	6 unit
2.	Polindes	1 unit
3.	TK	1 unit
4.	SD/MI	2 unit
5.	TPA/TPQ	2 unit
6.	Tempat Ibadah	22 unit
7.	Lapangan Olahraga	1 buah
8.	Jalan	10.800
9.	Jembatan	12 unit

Sumber Data: RPJMDes Kerten Tahun 2019-2024

Berdasarkan pada tabel diatas mengenai sarana dan prasarana yang ada di desa Kerten sudah cukup baik, hal ini dilihat dengan adanya fasilitas-fasilitas umum serta infrastruktur yang ada di desa Kerten yang sudah memadai dan mendukung aktivitas masyarakat. Namun jika dilihat dari segi pendidikan yang ada, desa Kerten belum mempunyai gedung SMP dan SMA yang dapat membantu berjalannya pendidikan secara evektif, hal ini dapat mempengaruh peningkatan kapasitas SDM yang baik.

F. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kerten

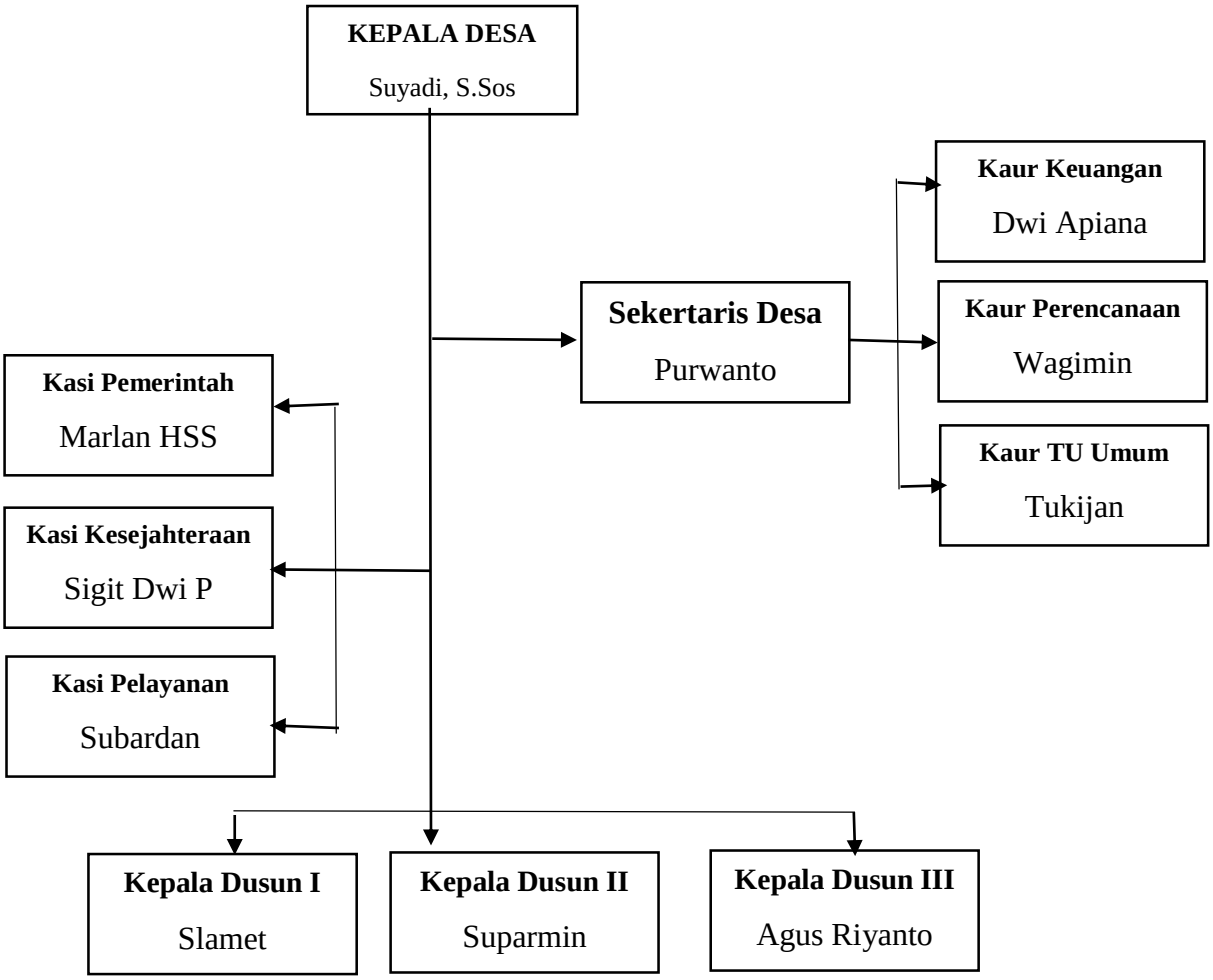

SumberData: RPJMDes Kerten Tahun 2019-2024

Dari data yang ada di atas berupa bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kerten dapat disimpulkan bahwa, pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD yang didalamnya terdapat kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa mencangkup sekretaris desa, seksi pemererintahan yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di desa. Seksi kesejahteraan dan pelayanan yang mengurus urusan kemasyarakatan yang ada di desa. Serta terdapat kaur keuangan dan tata usaha umum dan perencanaan yang juga mempunyai peran penting dalam

proses berjalannya pemerintahan yang efektif dan efesien. Desa Kerten juga terdapat tiga kepala dusun yang mengatur dan mengurus masyarakat dalam ranah yang lebih sempit dalam struktur organisasi desa.

Kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD, setelah adanya ketetapan bersama tersebut kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah kepada bupati, memberikan pertanggung jawaban kepada BPD kemudian menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan tersebut kepada masyarakat demi tercapainya transparansi yang ada di desa. Dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya staf urusan bertanggung jawab kepada kepala urusan dan kepala urusan kemudian bertanggung jawab kepada sekretaris desa, dalam rangka penyelengaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan kepala desa dibantu lembaga masyarakat yang ada.

Tugas dan fungsi Aparatur Pemerintah Desa Kerten

a) Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b) Badan Permusyawaratan Desa

Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

c) Carik/ Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
2. Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa;
3. Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa;
4. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin;
5. Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

d) Kaur Keuangan

Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan desa. Selain tugas tersebut, Kaur Keuangan Desa juga tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa);
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kaur Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti:

1. Pengurusan administrasi keuangan
2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
3. Verifikasi administrasi keuangan, dan
4. Admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

e) Kaur Umum & Perencanaan

Kaur Perencanaan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan perencanaan. Dalam pengelolaan keuangan desa, Kaur Perencanaan di Desa bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam struktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sesuai bidang tugasnya.

Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi perencanaan desa. Selain tugas tersebut, Kaur Perencanaan Desa juga bertugas:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya;
5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Untuk melaksanakan tugasnya, Kaur Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti:

1. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
3. Melakukan monitoring;
4. Evaluasi program;
5. Penyusunan laporan.

f) Kasi Kesejahteraan

Kasi Kesejahteraan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Kasi Kesejaahteraan memilki fungsi:

- Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
- Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;

- Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan Karang Taruna.

g) Kasi Pemerintahan

Kasi Pemerintahan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pemerintahan desa.

Kasi Pemerintahan memiliki fungsi:

1. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
2. Menyusun rancangan regulasi desa;
3. Pembinaan masalah pertanahan;
4. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
6. Kependudukan;
7. Penataan dan pengelolaan wilayah;
8. Pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

h) Kasi Pelayanan

Kasih Pelayanan memiliki tugas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Des, DPA, DPAL. Untuk melaksanakan tugasnya maka kasi pelayanan memiliki fungsi:

1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa dalam hal, gotong royong, dan swadaya murni.
3. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa.
4. Pembinaan dan pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat di desa.
5. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dalam masyarakat.
6.

i) Kepala Dukuh

Kepala Dukuh adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Kepala Dukuh bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dusun memiliki fungsi:

1. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Membantu Kasi dan Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam hal sifat dan jenis kegiatannya tidak dapat dilakukan sendiri
3. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
4. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
5. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

G. Karang Taruna

Karang taruna adalah salah satu organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia. Karang taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisipan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda, yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi sosial kepemudaan, karang taruna berfunsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia

dilingkungan. Baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada.

Desa kerten sendiri memiliki organisasi karang taruna yang diberi nama Karang Taruna Tunas Bhakti. Karang Taruna Tunas Bhakti ini dibentuk Kembali pada tahun 2019. Setelah sebelumnya tidak berjalan dengan baik atau vakum. Sebagai organisasi kepemudaan, karang taruna berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga yang dimana telah diatur tentang struktur pengurus dan masa jabatan dimasing-masing wilayah mulai dari desa sampai pada tingkat nasional. Semua ini wujud dari regenerasi organisasi demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota karang taruna baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan atang.

Karang Taruna "Tunas Bhakti Kerten" adalah organisasi sosial generasi muda yang bersifat keswadayaan, kebersamaan, dan berdiri sendiri serta merupakan salah satu pilar partisipasi masyarakat di bidang kesejahteraan sosial. Karang Taruna "Tunas Bhakti Kerten" memiliki tugas pokok bersama-sama dengan Pemerintah dan masyarakat lainnya dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Karang Taruna "Tunas Bhakti Kerten" mempunyai fungsi, yakni:

1. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda.
2. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda.
3. Meningkatkan usaha ekonomi produktif.
4. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal.

6. Memelihara dan memperkuat semangat Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keanggotaan

Keanggotaan karang taruna "Tunas Bhakti Kerten" terdiri dari anggota pasih dan anggota aktif. Anggota pasif adalah keanggotaan yang bersifat stelsel pasif yang berarti seluruh anggota yang tergabung adalah masyarakat yang berusia 11 tahun sampai dengan usia 45 tahun. Sedangkan anggota aktif adalah anggota yang terlibat secara aktif dan berusia 15 tahun sampai dengan usia 40 tahun serta memiliki potensi, bakat serta produktifitasnya untuk mendukung pengembangan organisasi dan program-programnya.

Kewajiban Anggota

Anggota Karang Taruna "Tunas Bhakti Kerten" memiliki kewajiban yang mesti dilakukan oleh stiap anggotanya. Kewajiban itu adalah sesuatu yang sudah disepakati Bersama sebelumnya. Kewajiban itu antara lain adalah:

1. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-Peraturan Karang Taruna "Tunas Bhakti Kerten".
2. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Karang Taruna "Tunas Bhakti Kerten".
3. Membayar iuran wajib setiap minggu atau bulan.
4. Menjaga nama baik Karang Taruna "Tunas Bhakti Kerten".

Hak Anggota

Anggota Karang Taruna "Tunas Bhakti Kerten" memiliki hak yang mesti dilakukan oleh stiap anggotanya. Hak itu adalah sesuatu yang sudah disepakati Bersama sebelumnya. Hak itu antara lain adalah:

1. Setiap anggota mempunyai hak bicara dan hak suara, serta hak untuk memilih dan dipilih.

2. Mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dari Karang Taruna “Tunas Bhakti Kerten”.
3. Mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan Karang Taruna “Tunas Bhakti Kerten”

Struktur Karang Taruna “Tunas Bhakti Kerten”

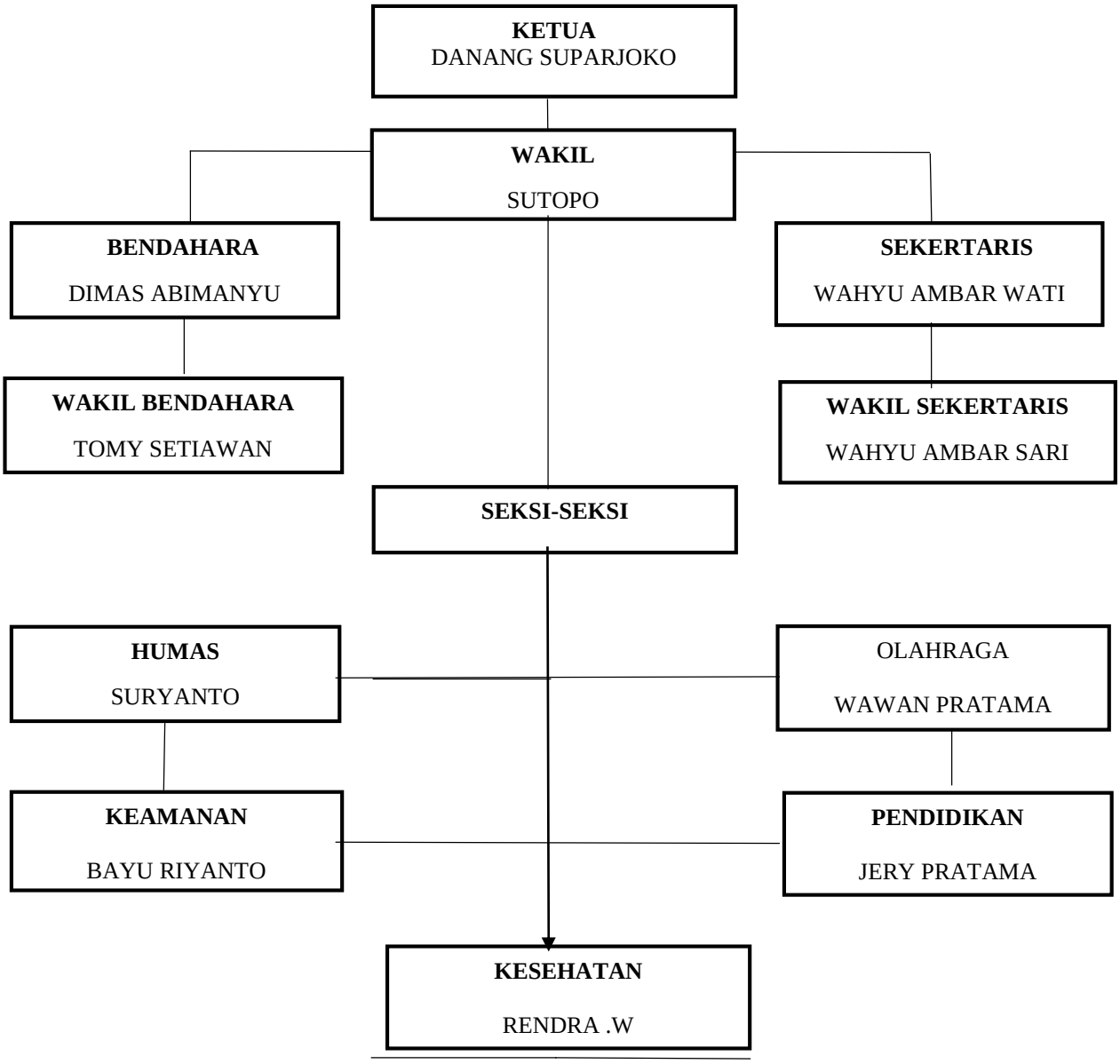

Sumber: AD/ART Karang Taruna 2019-2024

DAFTAR ANGGOTA KARANG TARUNA TUNAS BHAKTI KERTEN

NO	Nama	Keterangan
1	DANANG SUPARJOKO	Ketua
2	SUTOPO	Wakil Ketua
3	WAHYU AMBAR WATI	Sekertaris
4	WAHYU AMBAR SARI	Wakil Sekertaris
5	DIMAS ABIMANYU	Bendahara
6	BAYU RIYANTO	Wakil Bendahara
7	SURYANTO	Seksi Humas
8	BAYU RIYANTO	Seksi Keamanan
9	WAWAN PRATAMA	Seksi Olahraga
10	JERY PRATAMA	Seksi Pendidikan
11	RENDRA W.	Seksi Kesehatan
12	ROHMADI	Anggota
13	MEGA	Anggota
14	FELIKS	Anggota
15	TOMI	Anggota
16	IKHSANUDIN	Anggota
17	LINDUNG	Anggota
18	RUDY	Anggota
19	LIA RAHAYU	Anggota
20	FITRA	Anggota
21	RANDI	Anggota
22	ANDI	Anggota
23	BAMBANG	Anggota
24	DONI MAULANA	Anggota
25	SANDI	Anggota
27	JERY PRATAMA	Anggota
27	SYAHRUL SHIDIQ	Anggota

29	TOPIK	Anggota
30	ALDINO	Anggota

Sumber: AD/ART Karang Taruna 2019-2024

Berdasarkan table Daftar Anggota Karang Taruna Tunas Bhakti Kerten diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota karang taruna yang masih aktif sampai sekarang adalah hanya 30 orang. Anggota ini berasal dari 9 padukuhan yang berada di lingkungan desa kerten. Dari table ini juga disimpulkan bahwa kurangnya daya minat dari anak-anak muda yang ada di desa untuk terlibat atau bergabung dalam organisasi karang taruna

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

A. Pemerintah Desa

1. Pertanyaan
   a. Apakah ada upaya dari pemerintah untuk mengaktifkan kembali karang taruna?
   b. Apakah pemerintah melakukan pembinaan terhadap kelompok karang taruna?
   c. Apakah ada pembinaan berkelanjutan dari pemerintah terhadap lembaga karang taruna?
   d. Apa yang menjadi kendala atau hambatan anda dalam mengaktifkan kembali karang taruna ini?

B. Masyarakat Desa

1. Pertanyaan
   a. Apakah anda mengetahui jika di desa ini ada organisasi karang taruna?
   b. Apakah program dari karang taruna sudah berdampak ke lapisan masyarakat?
   c. Apakah pemdes melakukan pembinaan terhadap lembaga karang taruna?
   d. Apakah ada usul dan saran anda untuk karang taruna?

C. Karang taruna

1. Pertanyaan
   a. Mengapa Karang Taruba tidak aktif?
   b. Hal apa yang membuat anggota karang taruna tidak berpartisipasi secara aktif?
   c. Berapa jumlah anggota karang taruna?
   d. Sejak kapan karang taruna tidak aktif?
   e. Apa permasalahan yang sering muncul?